

**STATUS KEPEMILIKAN TANAH PEMBERIAN ORANGTUA KEPADA
ANAK PEREMPUAN MELALUI PAUSEANG PADA MASYARAKAT
BATAK TOBA DI KEC.DOLOK SANGGUL
KAB.HUMBANG HASUNDUTAN**

TIGOR SINAMBELA

ABSTRACT

'Pauseang' is one of the types of gift before and after a daughter gets married. A profound research on the giving of land through 'pauseang' needed to be conducted since nationally the position of a daughter today tends to be equal to that of a son. Besides that, land as a gift cannot be separated from the prevailing rule of marga land. The research on the giving of land through 'pauseang' was conducted to find out the reason for giving land through 'pauseang' and to find out the status of a daughter's ownership of the land. The research used judicial empirical analysis with descriptive analytic method. Based on the result of the research, it was found that the giving of land through 'pauseang' was done because the factors of love and affection, economy, and land as the identity for kinship and for family honor. The development of a daughter's position as an heir nationally did not cause her to have property rights on land, given by her parents; she only had the right of use.

Keywords : Daughter, Batak Toba, Pauseang

I. Pendahuluan

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil dan patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif).¹

Hukum adat mengatur berbagai sendi kehidupan masyarakat adat seperti mengatur kehidupan keluarga, perkawinan, waris, tanah, hutang piutang dan pelanggaran terhadap hukum adat.² Pemberian tanah orangtua kepada anak perempuan melalui *pauseang* pada masyarakat Batak Toba menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam dikarenakan pemberian

¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hal.27

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.118-119

tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai hukum adat yang berlaku di lokasi penelitian. Di satu sisi, tanah merupakan objek pemberian sedangkan di sisi lain tanah juga merupakan objek warisan yang kelak akan dibagi waris pada saat orangtua meninggal. Pemberian tersebut juga tidak terlepas kaitannya dengan hukum tanah *marga* yang berlaku, dimana berdasarkan hukum tanah *marga*, hanya laki-laki saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Demikian pula bahwa pemberian tanah melalui *pauseang*, juga tidak terlepas kaitannya dengan kedudukan anak perempuan dalam sistem hubungan kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Batak Toba.

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian tersebut, adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa dilakukan pemberian tanah oleh orangtua kepada anak perempuannya melalui *pauseang* di Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Bagaimana status kepemilikan tanah yang diberikan kepada anak perempuan melalui *pauseang*?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan dilakukannya pemberian tanah *pauseang* oleh orangtua kepada anak perempuannya di Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Untuk mengetahui status kepemilikan tanah yang diberikan kepada anak perempuan melalui *pauseang*

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian *yuridis empiris* dengan metode pendekatan bersifat *deskriptif analitis*. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara (interview) yang dilakukan terhadap :
 - (1). Orangtua yang pernah memberikan tanah melalui *pauseang*

- (2). Anak perempuan yang pernah menerima tanah melalui *pauseang*
- (3). Tokoh masyarakat dan kepala desa
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan acuan untuk penulisan tesis ini, yaitu:
 - (1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari nomor dasar, yaitu Undang-undang Dasar 1945, perundang-undangan, putusan pengadilan dan hukum yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum adat
 - (2). Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti ketentuan-ketentuan dan komentar mengenai hukum waris adat, jurnal, buku-buku petunjuk lain maupun yang diperoleh dari situs internet (website) yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberian merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat adat. Menurut Hilman Hadikusuma, pemberian tanah yang terjadi dalam masyarakat adat dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti tanda pengabdian, sebagai tanda kekeluargaan, sebagai pembayaran denda, sebagai pemberian perkawinan maupun sebagai barang bawaan dalam perkawinan.³

Berdasarkan hasil penelitian di Kec.Dolok Sanggul Kab.Humbang Hasundutan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pemberian tanah melalui *pauseang*. Pemberian dilakukan berdasarkan faktor kasih sayang, ekonomi, identitas kekerabatan, maupun kehormatan keluarga. Di samping *pauseang* yang diberikan kepada anak perempuan, dikenal pula *panjaean* yang diberikan kepada anak laki-laki. Pemberian *pauseang* di samping *panjaean* kepada anak laki-laki, dilatarbelakangi oleh rasa kasih sayang orangtua

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung:PT Alumni, 1982), hal.149

yang sama kepada anak perempuan maupun anak laki-laki.⁴ Menurut Tunas Pasaribu, tanah *pauseang* diberikan kepada anak perempuan pada setelah melangsungkan perkawinan tanpa membedakan antara anak perempuan tertua dengan yang lebih muda. Pemberian tanah *pauseang* dilakukan orangtua dikarenakan ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya yang tidak pernah putus kepada anak perempuan walaupun telah berumahtangga.⁵

Pemberian tanah *pauseang* yang dilatarbelakangi faktor ekonomi, tidak hanya terjadi karena dilatarbelakangi keadaan ekonomi anak perempuan yang lemah, akan tetapi dapat pula terjadi karena latarbelakang ekonomi keluarga yang kaya raya.

Tanah bagi masyarakat di lokasi penelitian merupakan identitas atau tanda pengenal kelompok kekerabatan yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberian tanah *pauseang* merupakan salah satu faktor agar pihak kerabat suami dari penerima *pauseang* tidak hanya mengetahui identitas orangtua (pemberi *pauseang*), tetapi juga identitas kekerabatannya.⁶

Selain dilatarbelakangi oleh ketiga faktor tersebut, pemberian tanah melalui *pauseang* dimaksudkan agar pihak kerabat suami maupun kerabat lainnya menghormati anak perempuan dan keluarganya. Anak perempuan melalui pemberian tanah melalui *pauseang*, dapat menikmati, mengusahakan, menempati dan mengambil hasil dari tanah yang diberikan tersebut. Tanah yang telah diberikan tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak sepanjang anak perempuan tersebut masih hidup dan mempunyai keturunan. Tanah tersebut baru dikembalikan sebagai bagian dari harta warisan orangtua, apabila anak perempuan telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan seorang keturunanpun atau telah bercerai dengan suaminya. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa tanah yang diberikan melalui *pauseang* bukan merupakan pewarisan atau dengan kata lain bahwa pemberian melalui tanah *pauseang* tidak

⁴Bontor Sinambela, tokoh adat/ Kepala Desa Janji, hasil wawancara tanggal 10 Juni 2013

⁵ Tunas Pasaribu, tokoh adat di Desa Pasaribu, hasil wawancara tanggal 12 Juni 2013

⁶ Dirman Sinambela, tokoh adat di Desa Sihite I, hasil wawancara tanggal 13 Juni 2013

serta merta memberikan anak perempuan kedudukan sebagai ahli waris orangtuanya.

Perlindungan terhadap hak anak perempuan atas tanah *pauseang* diperoleh melalui pengesahan secara adat. Penyerahan pemberian tanah melalui *pauseang* secara adat, ditandai dengan telah ditentukannya tanah yang dijadikan *pauseang* untuk anak perempuannya. Penyerahan tanah *pauseang* tidak mempunyai batas waktu sejak pemberian disampaikan. Penyerahan tanah *pauseang* berarti bahwa penerima (*boru* dan suami) dapat dengan seketika itu juga mengusahai dan/atau menempati tanah *pauseang* yang diberikan.

Tidak seperti pemberian tanah melalui *pauseang* yang dilakukan pada saat dilangsungkan perkawinan, pemberian tanah melalui *pauseang* berdasarkan permintaan anak perempuan (*boru*) dan suaminya (*hela*) dilakukan dengan suatu acara adat yang khusus. Acara adat khusus tersebut dilakukan di tempat tinggal orangtua perempuan (pemberi) yang harus dihadiri oleh unsur *Dalihan Na Tolu*. Unsur *Dalihan Na Tolu* yang hadir lebih sederhana apabila dibandingkan dengan unsur *Dalihan Na Tolu* yang hadir dalam acara adat perkawinan. Unsur *Dalihan Na Tolu* yang utama terdiri dari kelompok *hula-hula* yang terdiri dari orangtua dan saudara kandung anak perempuan tersebut beserta suami atau isterinya masing-masing. Kelompok *hula-hula* juga dapat terdiri dari kakek dan nenek (*ompu*) jika masih ada.⁷

Kehadiran ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* merupakan bagian dari pengesahan pemberian tanah *pauseang* secara adat agar pemberian menjadi konkret dan terang, dimana ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* bertujuan untuk membuktikan bahwa tanah *pauseang* yang diberikan benar-benar merupakan milik dari orangtua perempuan dan di samping itu, ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* yang hadir merupakan saksi bahwa benar tanah *pauseang* telah diberikan. Apabila terjadi permasalahan terkait tanah *pauseang* tersebut, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mendengarkan kesaksian dari ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* yang hadir.

Di Desa Janji, pemberian tanah *pauseang* juga wajib diketahui dan dihadiri oleh keturunan dari pemimpin persekutuan yang pertama kali (*marga tano* atau *marga raja*) membuka *huta* tempat tanah *pauseang* berada. Pemimpin persekutuan yang pertama kali membuka tanah di Desa Janji bernama Raja Upar Sinambela dan keturunan Raja Upar Sinambela yang mewakili anggota persekutuan yang lain bernama Bontor Sinambela. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih mengakui eksistensi dan mematuhi hukum tanah *marga*.⁸

Pada acara adat tersebut, anak perempuan beserta suaminya (*hela*) membawa makanan (*mamboan sipanganon*) untuk diserahkan kepada *hula-hula* dan kemudian dimakan bersama. Makanan yang dibawa dapat berupa satu ekor daging kambing, babi atau kerbau sesuai dengan kemampuan yang membawa. *Hula-hula* kemudian menerima makanan yang dibawa dan memberikan pula ikan mas (*dekke*) kepada pihak *boru*.

Pada acara adat ini (*mamboan sipanganon*), pihak *boru* akan memberitahukan maksud kedatangannya adalah untuk meminta apa yang menjadi *pauseang* orangtuanya.⁹ Orangtua juga akan menanyakan alasan permintaan tersebut dan kemudian menyampaikan persetujuannya untuk memenuhi keinginan anak perempuannya tersebut dengan menyebutkan tanah mana yang diberikan. Pernyataan kesanggupan memberikan tanah *pauseang* tersebut disampaikan dengan nasehat dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (*Mulajadi Na Bolon*). Doa yang dipanjatkan merupakan doa meminta izin kepada Tuhan untuk memberikan tanah dan meminta agar tanah yang diberikan menjadi berkat bagi kehidupan anak perempuan dan keluarganya.

Anak perempuan dan suaminya (*hela*) menyatakan akan menerima tanah *pauseang* tersebut dan kemudian kepada orangtua perempuan diberikan *piso* yang merupakan simbol rasa hormat anak perempuan dan suaminya kepada orangtua perempuan (*simatua*). Pemberian *piso* ini juga diyakini masyarakat Batak Toba untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan alam atau

⁸Bontor Sinambela, tokoh adat/ Kepala Desa Janji, hasil wawancara tanggal 12 Juni 2013

⁹Sebelum dilakukan acara adat tersebut, anak perempuan sebenarnya telah menyampaikan keinginannya untuk meminta tanah *pauseang* kepada orangtuanya

kekosongan *magis (tondi)* yang terjadi akibat pemberian tersebut yang berarti bahwa perbuatan orangtua yang memberi harus pula dibalas dengan perbuatan memberi pula.

Piso ini berupa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam lipatan daun sirih dan diletakkan di atas sepiring beras (*nampuran tiar*). Uang yang diberikan jumlahnya tidak ditentukan (relatif) sesuai dengan kesepakatan anak perempuan dan suaminya, di samping itu uang tersebut bukanlah merupakan pembayaran atas tanah yang diberikan tersebut. Acara tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian uang sebagai pengingat (*ingot-ingot*) kepada unsur *Dalihan Na Tolu* yang hadir lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak perempuan atas tanah *pauseang* diperoleh melalui pengesahan secara adat. Menurut Tunas Pasaribu, pengesahan secara adat sudah cukup untuk memberikan kepastian hukum (secara adat) dan melindungi hak anak perempuan atas tanah *pauseang* yang diterimanya. Pada dasarnya, pengesahan secara adat pemberian tanah *pauseang* dimaksudkan untuk menjunjung nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya untuk melindungi hak perempuan atas tanah *pauseang*.¹⁰

Menurut Dirman Sinambela, pengesahan pemberian tanah *pauseang* secara adat dilakukan untuk menjaga agar masyarakat Batak Toba tetap menaruh rasa hormat berdasarkan fungsinya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan pemberian tanah melalui *pauseang* dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan merupakan amanah orangtua, sehingga anak akan sangat menghormati dan tidak berani melanggar amanah orangtuanya tersebut.¹¹

Pengesahan pemberian tanah *pauseang* di hadapan unsur *Dalihan Na Tolu* agar unsur *Dalihan Na Tolu* khususnya para ahli waris mengetahui dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari sepeninggal orangtua. Pengesahan di hadapan unsur *Dalihan Na Tolu* selain dapat menghindarkan perselisihan, bertujuan pula agar perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian

¹⁰Tunas Pasaribu, tokoh adat di Kelurahan Pasaribu, hasil wawancara tanggal 12 Juni 2013

¹¹Dirman Sinambela, tokoh adat Desa Sihite, hasil wawancara tanggal 18 Desember 2013

hari dapat diselesaikan. Pengesahan pemberian tanah *pauseang* di hadapan keturunan yang mewakili *marga tano* bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara anggota desa (*huta*) apabila tanah *pauseang* di kemudian hari diusahakan atau ditempati oleh anak perempuan beserta keluarganya maupun keturunannya.

Menurut Bontor Sinambela¹², perselisihan terkait pemberian tanah *pauseang* kepada anak perempuan kemungkinan dapat berasal dari pihak mana saja, seperti saudara kandung laki-laki anak perempuan, saudara laki-laki orangtua (pemberi *pauseang*), maupun keturunan berikutnya. Pada umumnya segala bentuk perselisihan yang mungkin terjadi dalam pemberian tanah melalui *pauseang*, penyelesaiannya diawali dengan pembahasan diantara para pihak yang berselisih saja, belum melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu*. Apabila tidak berhasil, maka akan diadakan pertemuan dengan mengundang ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* yaitu *dongan sabutuha*, *boru* maupun *hula-hula*. Kehadiran ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* diharapkan untuk memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang disaksikan pada saat pemberian tanah *pauseang* disahkan secara adat. Di samping itu, ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* juga diharapkan secara bijaksana dapat memberikan pemecahan atas perselisihan yang terjadi.

Menurut Tunas Pasaribu, pengesahan secara adat sudah cukup untuk memberikan kepastian hukum (secara adat) dan melindungi hak anak perempuan atas tanah *pauseang* yang diterimanya. Pada dasarnya, pengesahan secara adat pemberian tanah *pauseang* dimaksudkan untuk menjunjung nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya untuk melindungi hak perempuan atas tanah *pauseang*.¹³

Menurut Dirman Sinambela, pengesahan pemberian tanah *pauseang* secara adat dilakukan untuk menjaga agar masyarakat Batak Toba tetap menaruh rasa hormat berdasarkan fungsinya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan pemberian tanah melalui *pauseang* dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan

¹²Bontor Sinambela, Kepala Desa Janji/ tokoh adat, hasil wawancara tanggal 18 Desember 2013

¹³Tunas Pasaribu, tokoh adat di Kelurahan Pasaribu, hasil wawancara tanggal 12 Juni 2013

merupakan amanah orangtua, sehingga anak akan sangat menghormati dan tidak berani melanggar amanah orangtuanya tersebut.¹⁴

Menurut Pantun Panggabean¹⁵, akan selalu ada potensi terjadinya konflik di kemudian hari. Tanah yang bersifat tetap jumlahnya dan peningkatan jumlah penduduk yang membutuhkan tanah menjadi penyebab kebutuhan tanah yang semakin meningkat. Kemungkinan terbesar tidak berasal dari pihak-pihak terkait yang hadir dan menyaksikan pemberian tersebut, melainkan bukti secara tertulis dibutuhkan untuk mencegah kemungkinan konflik yang berasal dari keturunan atau generasi berikutnya.

Pemberian tanah melalui *pauseang* tidak dinyatakan dalam suatu akta khusus dengan judul akta pemberian tanah melalui *pauseang* kepada anak perempuan, akan tetapi untuk membuktikan sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan membuat akta hibah di hadapan PPAT. Hibah tanah adalah salah satu perbuatan hukum atas tanah dan untuk membuktikan sahnyanya suatu hibah tanah dilakukan dengan membuat akta hibah yang merupakan kewenangan PPAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP 37/1998.

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Menurut PP 37/1998 Pasal 2 ayat 2, PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta hibah. Menurut Pasal 1 angka 24 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Dari kedua peraturan mengenai PPAT tersebut, maka dapat diketahui bahwa akta hibah merupakan akta otentik Sebagai akta otentik, akta hibah mempunyai keistimewaan sebagai suatu bukti yang sempurna (*volledig bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa

¹⁴Dirman Sinambela, tokoh adat Desa Sihite, hasil wawancara tanggal 18 Desember 2013

¹⁵Pantun Panggabean, Notaris/ PPAT di Kabupaten Humbang Hasundutan, hasil wawancara tanggal 25 Juni 2013

yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.¹⁶

Pada umumnya tanah yang ada di Kecamatan Dolok Sanggul belum dilakukan pendaftaran tanah atau belum bersertipikat, oleh karena itu pembuatan akta hibah di hadapan PPAT harus melalui dua tahap. Pertama, dilakukan pendaftaran tanah atas nama orangtua sebagai pemberi tanah. Pendaftaran tanah dapat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dan dapat dibantu oleh PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah dilanjutkan dengan penerbitan sertipikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang termuat di dalamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tahap kedua adalah dengan membuat akta hibah dari orangtua (pemberi) kepada anak perempuannya (penerima), sehingga dengan berdasarkan akta hibah tersebut kemudian dimohonkan untuk dilakukan balik nama sertipikat atas nama anak perempuan di Kantor Pertanahan.

Perlindungan dan kepastian hukum yang diperoleh dengan membuat akta otentik berupa akta hibah di hadapan PPAT, hanya dapat dilakukan sepanjang terdapat kesepakatan antara orangtua dengan ahli warisnya untuk memberikan hak milik tanah kepada anak perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan sifat pemberian tanah *pausageang* yang tidak mengakibatkan berpindahnya hak milik tanah dari orangtua kepada anak perempuan karena hanya memberikan hak pakai tanah saja.

Perlindungan dan kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan dan mempertimbangkan keabsahan pemberian tanah melalui *pausageang* secara adat, dapat dilakukan dengan membuat akta otentik di hadapan Notaris yang dapat berupa Akta Berita Acara Rapat Adat (Kaum) dan Akta Hibah. Berdasarkan akta tersebut, dapat dibuktikan bahwa adalah benar telah terjadi pemberian tanah melalui *pausageang* secara adat oleh orangtua kepada anak perempuannya yang disaksikan di hadapan unsur *Dalihan Na Tolu*.

¹⁶I.G.Ray Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi:Kesaint Blanc,2004), hal.13

Jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak perempuan atas tanah *pauseang* juga dapat diperoleh dengan membuat akta hibah di hadapan Notaris. Berbeda dengan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT, akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris dimaksudkan untuk tanah pemberian yang belum didaftarkan sebagaimana berdasarkan UUPA dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris selain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, juga harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris wajib mencantumkan secara tegas :

1. Bahwa pemberian tanah kepada anak perempuan hanya sebatas hak pakai, bukan menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik atas tanah.
2. Bahwa pemberian tanah tidak selamanya, melainkan pemberian tanah dapat ditarik kembali yaitu apabila anak perempuan meninggal terlebih dahulu daripada orangtua (pemberi) dengan tanpa memiliki keturunan atau apabila anak perempuan bercerai dengan suaminya.

Berdasarkan hasil penelitian, responden tidak melakukan pengesahan pemberian tanah *pauseang* dengan membuat akta hibah di hadapan PPAT maupun Notaris yang dipengaruhi faktor sebagai berikut :

1. Faktor masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat.

Pemberian tanah *pauseang* bukan hanya sekedar pemindahan hak atas tanah dari orangtua kepada anak perempuan. Pemberian tanah *pauseang* merupakan peristiwa yang dianggap memiliki kekuatan *magis religius*. Acara pemberian tanah *pauseang* dilakukan dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (*Mulajadi Na Bolon*) untuk meminta izin memberikan tanah dan meminta agar tanah yang diberikan menjadi berkat kepada anak perempuan dan keluarganya. Akibat dari keyakinan masyarakat yang masih tinggi tersebut, pihak manapun yang ikut serta dalam peristiwa pemberian tanah *pauseang* dianggap tidak akan berani melanggar ketentuan yang ada.

Dalam pemberian tanah melalui *pauseang* terdapat amanah orangtua kepada anak-anaknya. Anak perempuan yang menerima tanah melalui *pauseang* harus mempergunakan tanah dengan tujuan yang baik dan tidak akan

menelantarkan tanah yang diberikan. Anak yang belum/ tidak memperoleh tanah *pauseang* wajib mematuhi dan tidak dapat membantah pemberian tersebut. Kepatuhan anak yang tidak memperoleh tanah *pauseang* didasari oleh rasa hormat yang tinggi kepada pemberian tanah *pauseang* sebagai amanah dan keyakinan bahwa pemberian tanah dilakukan orangtua secara bijaksana.

Keyakinan masyarakat terhadap kekuatan *religius magis* dan amanah orangtua, menyebabkan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum (adat) terhadap pemberian tanah *pauseang* masih tinggi sampai saat ini. Penyangkalan terhadap pemberian tanah *pauseang* yang mengandung nilai *religius magis* dan amanah orangtua, diyakini akan mendatangkan akibat buruk atau karma.

Di samping nilai *religius magis* dan amanah orangtua, kepatuhan dan kesadaran hukum (adat) pemberian tanah *pauseang* juga dilatarbelakangi oleh hubungan kekeluargaan yang masih sangat erat dalam masyarakat. Penyangkalan terhadap pemberian tanah *pauseang* tidak dilakukan masyarakat agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Walaupun sangat jarang terjadi akan tetapi hal tersebut pernah dialami oleh EP, dimana tanah *pauseang* yang diberikan kepadanya diserahkan kepada saudara laki-lakinya yang merupakan anak tertua laki-laki di dalam keluarganya. EP mengatakan “*dang pe ala ni tano, sirang mudar iba*” yang artinya jangan hanya karena tanah putus hubungan kekeluargaan dengan saudara laki-lakinya.¹⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah mempunyai arti yang penting, namun masih ada yang lebih penting lagi yaitu hubungan kekeluargaan (*mudar*).

2. Faktor Pengetahuan yang Kurang

Pemberian tanah melalui *pauseang* yang tidak dilakukan dengan membuat akta hibah di hadapan PPAT maupun Notaris, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaatnya. Hal ini didukung pula dengan keadaan dimana masyarakat jarang menghadapi gangguan terhadap tanah yang ditempati tersebut.

¹⁷ EP, penduduk Desa Hutaraja, hasil wawancara tanggal 22 Juni 2013

Menurut hukum adat, hak atas tanah dapat berupa hak ulayat maupun hak perorangan. Hak ulayat ialah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama (komunal).¹⁸ Menurut Iman Sudiyat, hak perorangan yaitu suatu hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba (ulayat) persekutuan hukum adat yang bersangkutan. Hak perorangan ada 6 jenis, yaitu hak milik atau hak yasan (*inlands bezitrecht*), hak wenang pilih, hak menikmati hasil (*genotrecht*), hak pakai (*gebruiksrecht*) hak imbalan jabatan (*ambtelijk profijt recht*) maupun hak wenang beli (*naastingsrecht*)¹⁹

Perkembangan persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki secara nasional, tidak mempengaruhi perkembangan hak anak perempuan atas tanah yang diterimanya melalui *pauseang*. Pemberian tanah melalui *pauseang* tidak menyebabkan terjadinya hak milik dari orangtua kepada anak perempuan. Hak anak perempuan atas tanah *pauseang* hanya berupa hak pakai semasa hidup, dimana tanah *pauseang* dapat ditarik kembali apabila anak perempuan meninggal terlebih dahulu daripada orangtua dengan tidak meninggalkan keturunan. Di samping itu, tanah *pauseang* dapat dikembalikan karena anak perempuan dan suaminya melakukan perceraian.

Menurut Eugene Ehrlich, keberadaan keadilan yang statis dalam masyarakat cenderung mempertahankan kondisi-kondisi masyarakat yang ada, namun keberadaan keadilan yang statis akan diperlunak oleh keadilan yang dinamis yang diarahkan oleh cita-cita individualisme dan kolektivisme.²⁰ Di tengah perkembangan kedudukan perempuan ke arah kedudukan yang sama dengan anak laki-laki sebagai ahli waris, masyarakat di lokasi penelitian cenderung mempertahankan kondisi masyarakat yang ada sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam hal waris, kondisi masyarakat yang ada di lokasi

¹⁸Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria, Cet-2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.25

¹⁹Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta:Liberty,1981), hal.8

²⁰ Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 191

penelitian masih didasari oleh keadilan statis dan belum dipengaruhi oleh cita-cita individualisme.

Hal tersebut tentunya sesuai dengan pendapat Bushar Muhammad bahwa hukum adat yang ada akan patut untuk dipertahankan atau tidak, bergantung kepada kesadaran masyarakat.²¹ Demikian pula menurut Uthrecht, bahwa kesadaran seseorang untuk mematuhi hukum disebabkan:

1. Karena masyarakat menghendaknya, dimana masyarakat mematuhi hukum setelah pernah merasakan akibat dari pelanggaran suatu peraturan dan merasakan pembatasan hukum terhadap kepentingannya
2. Karena mematuhi hukum berarti dapat terhindar dari sanksi atas pelanggarannya, sehingga mematuhi hukum dapat mendatangkan ketentraman bagi seseorang
3. Karena adanya paksaan atau sanksi sosial, dimana seseorang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial karena melanggar sesuatu kaidah sosial atau hukum.
4. Karena merasa bahwa setiap orang berkepentingan untuk mematuhi peraturan yang ada.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemberian tanah melalui *pauseang* kepada anak perempuan masih terjadi pada kehidupan masyarakat Batak Toba saat ini yang disebabkan oleh faktor kasih sayang (*holong ni roha*), faktor ekonomi, faktor tanah sebagai identitas kekerabatan dan faktor kehormatan keluarga. Pengesahan pemberian tanah melalui *pauseang* dilakukan secara lisan di hadapan unsur *Dalihan Na Tolu* dan keturunan *marga tano*. Pengesahan pemberian tanah melalui *pauseang* tidak dilakukan di hadapan PPAT maupun Notaris, karena dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat maupun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peranan PPAT maupun Notaris.

²¹Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Pramita,1975), hal.19

2. Anak perempuan yang menerima tanah melalui *pauseang*, memiliki hak pakai atas tanah tersebut sepanjang hidupnya. Tanah yang pernah diberikan orangtua semasa hidup, merupakan bagian dari harta warisan atau peninggalan orangtua. Tanah tersebut wajib secara adat dikembalikan kepada saudara laki-laki atau saudara laki-laki ayahnya apabila anak perempuan telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan atau apabila terjadi perceraian. Perkembangan kedudukan anak perempuan ke arah persamaan dengan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris secara nasional, tidak sepenuhnya mengakibatkan perubahan hak anak perempuan terhadap tanah pemberian melalui *pauseang* yang diterima semasa hidup orangtuanya dari hak pakai menjadi hak milik atas tanah.

B. Saran.

1. Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Dolok Sanggul masih melakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat masyarakat dalam hal pemberian tanah melalui *pauseang*, sehingga pemberian tanah melalui *pauseang* hanya dilakukan secara lisan berdasarkan ketentuan adat setempat. Meningkatnya kebutuhan terhadap tanah dapat memungkinkan terjadinya peningkatan sengketa tanah di kemudian hari, maka pemberian tanah melalui *pauseang* sebaiknya dinyatakan dalam suatu bukti tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun dengan membuat akta otentik seperti akta hibah dan Berita Acara Rapat Adat (Kaum) di hadapan Notaris maupun akta hibah di hadapan PPAT, sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum terhadap hak anak perempuan atas tanah yang diterima melalui *pauseang*. Hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif Badan Pertanahan Nasional, PPAT maupun kalangan akademik memberikan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman yang intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberian tanah yang dilakukan di hadapan PPAT. Badan Pertanahan Nasional dan PPAT juga harus tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas serta menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak anak perempuan atas tanah pemberian melalui *pausageang* hanya terbatas pada hak pakai saja bukan hak milik. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada perbedaan kedudukan antara anak perempuan dengan anak laki-laki serta menunjukkan lemahnya kedudukan anak perempuan. Mengingat bahwa secara nasional antara laki-laki dan perempuan telah menuju ke arah persamaan kedudukan yang sama, maka sebaiknya kepada anak perempuan diberikan hak milik atas tanah yang diberikan melalui *pausageang*.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1982
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1975
- Prasetyo, Teguh, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Purbacaraka, Purnadi & A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria, Cet-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001
- Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Widjaya, I.G. Ray, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2004